

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu usaha sistematis yang mengarah pada memfasilitasi peserta didik dalam menjalani periode peralihan, baik dalam dimensi fisik maupun psikologis, dari keadaan saat ini menuju kondisi untuk mencapai potensi terbaik di masa mendatang. Pendidikan merupakan proses berkesinambungan yang membangun kualitas jangka panjang yang berakar pada budaya bangsa dan sila-sila pancasila (Jannah *et al.*, 2022).

Pendidikan merupakan aspek krusial memainkan peran penting dalam kualitas sumber daya manusia dan prospek masa depan suatu bangsa. Dalam konteks global yang terus berkembang, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter dan pengembangan potensi peserta didik secara utuh. Proses pendidikan memiliki kapasitas untuk melahirkan gagasan inovatif yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat dan penguatan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan menjadi instrumen penting dalam menyiapkan generasi yang adaptif, kreatif, dan mampu menjawab tantangan zaman di masa mendatang (Rahayu *et al.*, 2022).

Sistem pendidikan Indonesia terus mengalami evolusi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Perkembangan ini tercermin dalam berbagai peraturan dan penyesuaian standar pendidikan, salah satunya adalah penyempurnaan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, yang memastikan bahwa sistem pendidikan terus mengalami perubahan. Bahkan sejak tahun 1947, sistem pendidikan Indonesia telah memperbarui kurikulum sebanyak sepuluh kali (Priantini et al., 2022).

Kurikulum dianggap sebagai "inti" pendidikan, yang memerlukan peninjauan ulang yang kreatif, dinamis, dan berkala sebagai respon terhadap kemajuan sains dan teknologi. Pendidikan dituntut untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan spesifik sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan tantangan profesi di era modern. Dengan demikian, revisi dan pembaruan kurikulum tidak dapat dihindari. Mengingat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia pendidikan dituntut untuk terus beradaptasi dan tidak terjebak dalam "zona nyaman" dengan menggunakan pendekatan atau kurikulum lama. Perubahan yang cepat dalam berbagai bidang menuntut sistem pendidikan untuk senantiasa melakukan inovasi, baik dalam metode pembelajaran, materi ajar, maupun tujuan pendidikan itu sendiri. Di luar konteks dinamika politik yang sedang berlangsung, perlu diketahui bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) telah mengalami tiga kali perubahan dalam kurun waktu enam tahun terakhir, yakni melalui Permenristekdikti Nomor 49 Tahun 2014,

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tersebut sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang menyatakan bahwa revolusi pendidikan menuntut adanya percepatan bukan sekadar kecepatan (Suryaman, 2020).

Pemerintah baru-baru ini menerbitkan sejumlah aturan yang mengundang perdebatan di ruang publik. Kebijakan-kebijakan ini kerap kali memicu kontroversi di kalangan akademisi, masyarakat umum, dan praktisi tentang dampak dan implementasinya, yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi harapan atau kebutuhan yang ada, termasuk kurikulum "Merdeka Belajar". Perdebatan mengenai isu ini cukup hangat, mengingat ditetapkannya kebijakan penghapusan Ujian Nasional pada tahun 2021 dan penggantinya dengan sistem penilaian baru, yaitu Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) dan survei karakteristik. Strategi ini menuai beragam tanggapan, baik positif maupun negatif, mengenai efektivitas dan dampaknya terhadap mutu pendidikan dan penilaian kemampuan siswa (Marisa, 2021).

Merdeka belajar merupakan strategi perubahan yang digagas oleh Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada kepala sekolah dan pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan. Kebijakan merdeka belajar dirancang sebagai strategi transformasi pendidikan yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berpengetahuan, adil, dan bijaksana. Melalui

pendekatan ini, diharapkan sistem pendidikan dapat mencetak individu-individu yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat serta kesadaran sosial yang tinggi. Dalam konteks perubahan sosial dan perkembangan zaman yang terus berlangsung, pendidikan perlu ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pembangunan bangsa. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut menjadi kunci dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki kecakapan hidup, berpikir kritis, serta mampu berkontribusi secara aktif di tengah masyarakat (Hutabarat *et al.*, 2022).

Tujuan membangun kurikulum pembelajaran mandiri adalah untuk membantu guru menciptakan lingkungan belajar yang lebih fleksibel yang diselaraskan dengan potensi siswanya dengan berpikir secara mandiri sehingga dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Sehingga peserta didik dapat mengembangkan kreativitasnya semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Guru dalam Islam dipandang sebagai penerus tradisi pengetahuan yang dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang juga berperan sebagai seorang guru. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 151:

وَيُعَلِّمُكُمُ وَيُزَكِّيْكُمْ تِنَاءِ اِيْ عَلَيْنُكُمْ يَتْلُو مِنْكُمْ رَسُوْلًا فِيْكُمْ اَرْسَلْنَا كَمَا

تَعْلَمُوْنَ تَكُوْنُوْا لَمْ مَّا وَيُعَلِّمُكُمْ وَالْحِكْمَةَ الْكِتٰبِ

Artinya:"Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul dari golonganmu sendiri, yang membacakan ayat-ayat Kami kepadamu, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu Al-Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui.

Ayat ini mengandung makna bahwa tugas guru adalah mendidik dan

membimbing manusia agar memperoleh ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Guru berfungsi sebagai penyampai ilmu dan pembimbing nilai-nilai akhlak. Dengan memahami posisi guru yang strategis dalam pembentukan karakter siswa, maka sangat penting bagi setiap pendidik untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran (Fadhil *et al.*, 2024).

Program Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan mencerminkan kesesuaian dengan falsafah Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya kemerdekaan dalam proses pembelajaran. yang menyatakan bahwa pendidikan harus berlandaskan pada asas kemandirian, artinya manusia berhak mengatur kehidupannya secara mandiri dengan tetap berada dalam batasan kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat. Selama proses pembelajaran di ruang kelas cenderung hanya mengandalkan guru sebagai fasilitator, yang menyebabkan rendahnya motivasi dan antusiasme belajar peserta didik. Model pembelajaran seperti ini tentu akan menghambat kemampuan siswa dalam mengaktualisasikan diri karena keterbatasan keahlian guru. Lebih jauh lagi, sistem pemeringkatan yang menjadi tolok ukur keberhasilan belajar siswa tentu akan memecah siswa menjadi dua kelompok, yaitu siswa pintar dan siswa biasa (Anggraini & Wiryanto, 2022).

Kurikulum pembelajaran merdeka belajar saat ini memberikan kebebasan belajar bagi pendidik dan peserta didik yang tentunya cocok dengan karakteristik siswa. Kebijakan Merdeka Belajar adalah bentuk dari kurikulum yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran dimana memungkinkan siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Melalui kurikulum ini, memanfaatkan metode yang mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik siswa dan situasi sekitar, di mana sekolah dapat memilih pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa serta konteks sosial dan budaya di sekitarnya. Kurikulum merdeka dimaksudkan untuk memberdayakan sekolah dan pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan mereka sendiri berdasarkan kebutuhan siswa. Kurikulum merdeka memiliki keistimewaan berikut dibandingkan kurikulum sebelumnya yaitu tidak rumit dan lebih terperinci, lebih lepas, lebih berhubungan dengan keterlibatan siswa, dan memungkinkan guru untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif (Yulianto, 2024).

Hal ini sesuai dengan gagasan dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan proses pendampingan terhadap perkembangan potensi peserta didik tau potensi bawaan yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Dengan demikian, pendidik diharapkan mampu memfasilitasi perkembangan fitrah peserta didik agar

mereka dapat tumbuh dengan perilaku yang selaras dengan potensi dasar yang dimilikinya (Irawati *et al.*, 2022).

Manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pendidik dalam merancang, menyelenggarakan, dan melaksanakan proses pembelajaran baik secara formal di dalam kelas maupun melalui kegiatan di luar kelas supaya mendapatkan capaian pembelajaran yang optimal. Beberapa komponen proses manajemen pembelajaran berfungsi sebagai instrumen untuk melihat, mengukur, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Indikator manajemen pembelajaran meliputi tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Sistem manajemen pembelajaran ini dirancang dengan tujuan utama untuk mengoptimalkan pengembangan pendekatan pembelajaran yang mudah dibuat, direncanakan, diimplementasikan, dan dipantau. Penggunaan strategi pembelajaran tersebut dimaksudkan untuk membuat proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien. Efektifitas ini mengacu pada kemampuan guru untuk membantu siswa membangun dan mengembangkan sikap, pengetahuan, kemampuan, dan kreativitas mendasar yang diperlukan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial dan akademis mereka (Herman *et al.*, 2022).

Mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti menitikberatkan pada pengembangan karakter peserta didik melalui penanaman nilai-nilai spiritual, moral, dan etika untuk membimbing mereka dalam kehidupan. Pelaksanaan pembelajaran ini diarahkan pada upaya

menumbuhkan sikap positif, pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip agama, dan perilaku etis dalam interaksi sosial. Selain itu, karena merupakan mata pelajaran agama, peserta didik harus mengintegrasikan ilmu yang diperoleh secara menyeluruh, termasuk penerapannya. Pengajaran dalam mata pelajaran ini memainkan peranan kunci dalam membentuk moralitas peserta didik, memperkaya pengetahuan keagamaan, serta menginternalisasikan nilai-nilai luhur yang relevan dengan kehidupan beragama dan bermasyarakat (Sutrisno, 2022).

SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga merupakan satuan pendidikan yang mengimplementasikan manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI-BP) melalui pendekatan Kurikulum Merdeka, yang menekankan fleksibilitas, diferensiasi pembelajaran, serta penguatan karakter peserta didik sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Dalam hal ini terlihat dari manajemen yang diterapkan pada lembaga tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang sudah berjalan dilaksanakan dengan baik. Menurut informan Kepala SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga, tahapan mendalam proses pembelajaran tersebut telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan manajemen yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut dari penjelasan di atas, terdapat beberapa aspek dalam pelaksanaan manajemen pembelajaran di SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga yang sudah dijalankan dengan baik namun belum sepenuhnya dipahami dengan baik, dengan demikian perlu diteliti

lebih lanjut oleh peneliti. Dengan demikian, penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian dan kajian mengenai manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berbasis Kurikulum Merdeka di SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga. Sehingga penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ini yang tercermin dalam judul skripsi "Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Berbasis Kurikulum Merdeka di SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan rumusan masalah Bagaimana Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Berbasis Kurikulum Merdeka di SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berbasis Kurikulum Merdeka di SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya tentang

Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Berbasis Kurikulum Merdeka di SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga.

- b. Temuan penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai data referensi untuk upaya penelitian masa depan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kepala Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga pendidikan yang bersangkutan, khususnya SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga. Dengan demikian, kepala sekolah diharapkan dapat meningkatkan keterampilan manajemen kurikulumnya.

b. Bagi Guru

Penelitian yang dilakukan oleh institusi pendidikan diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kemajuan dunia pendidikan. Dalam hal ini, guru memiliki peran strategis untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan pendidikan Agama Islam serta Budi Pekerti yang disesuaikan dengan kurikulum merdeka. Masukan tersebut penting sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi dan pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik di lapangan.

c. Bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi bagi studi-studi berikutnya, sekaligus memperkaya wawasan keilmuan terkait pengelolaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang dilaksanakan berdasarkan kurikulum merdeka.

